

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PNPM  
DALAM PEMANFAATAN AIR BERSIH DI DESA BUO  
KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Oleh :

Riko Dalima<sup>1</sup>

Maria Heny Pratiknjo<sup>2</sup>

Mahyudin Damis<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Development is part of culture in an anthropological perspective. Development is the existence of a number of human actions. Meanwhile, culture is a guideline for human actions. Thus, development is oriented and aims to build the society and civilization of humanity. National development in Indonesia is carried out in order to build a Indonesian people and the development of the entire community. National development can be realize by poverty alleviation efforts either directly or indirectly through government programs.*

*There in 2013 the government realized the National Program of Community Empowerment (PNPM) Mandiri in order to fulfill clean water for the residents of Buo Village. With this independent PNPM, the villagers took the initiative to create a forum to hold meetings of all Buo villagers, actively participating in order to immediately overcome the shortage of clean water for decades. Buo villagers also actively build clean water shelters and pipelines to the homes of villagers. Finally, in 2013 the program was complete with the support and active participation of the community.*

*The National Program for Community Empowerment (PNPM) in the utilization of clean water that is considere successful is important. Every issue discussed can be direct to create community sustainability about clean water management in Buo Village.*

*Keywords: participation, development, clean water*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Pembimbing KTIS I

<sup>3</sup> Pembimbing KTIS II

## Pendahuluan

Keanekaragaman budaya Indonesia merupakan ciri khas unik negara yang harusnya dapat menjadi landasan pembangunan negara. Salah satu bidang yang menjadi fokus kajian antropologi adalah pembangunan. Dalam perspektif antropologi, pembangunan adalah bagian dari kebudayaan. Pembangunan adalah eksistensi dari sejumlah tindakan manusia. Sementara, kebudayaan merupakan pedoman bagi tindakan manusia. Dengan demikian berdasarkan pemahaman antropologi, pembangunan berorientasi dan bertujuan untuk membangun masyarakat dan peradaban umat manusia.

Keterkaitan atau korelasi antara masyarakat dan pembangunan akan terjadi melalui pengendalian dari kebudayaan. Di dalam kebudayaan, tatanan nilai menjadi inti dan basis bagi tindakan manusia. Fungsi elemen nilai (*cultural value*) bagi pembangunan adalah untuk mengevaluasi proses pembangunan agar tetap sesuai dengan standar dan kadar manusia.

Pembangunan nasional di Indonesia dilaksanakan dalam

rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program-program pemerintah. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri wilayah khusus desa tertinggal.

Pembangunan desa sangat memerlukan adanya partisipasi dari para pemimpin serta seluruh masyarakat hal ini berarti bahwa sarana pembangunan justru mendorong partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mengelola dengan segala kemampuan dari semua kebutuhan yang ada di desa. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak demi tercapainya pembangunan.

Oleh karena itu usaha-usaha untuk kebutuhan desa perlu dikelola sehingga tanggung jawab pembangunan desa akan dapat dikembangkan dan dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat

benar-benar terlibat dan turut berperan aktif di dalamnya, Berhasilnya pembangunan desa bukan saja dirasakan oleh kalangan pemerintah, tetapi semua masyarakat yang ada di desa.

Sejak tahun 2002 hingga 2012, masyarakat Desa Buo mengalami kekurangan air bersih. Sebagian besar warga desa harus berjalan kaki sepanjang satu kilometer (1 km), demi keperluan hidup mereka sehari-hari sebab Desa Buo hanya memiliki satu buah sumur yang mereka sebut air *Tora* dan pada Tahun 2013 pemerintah merealisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dari pemerintah guna pemenuhan air bersih untuk warga Desa Buo. Dengan adanya PNPM mandiri ini maka warga desa berinisiatif membuat suatu forum untuk melaksanakan rapat-rapat seluruh warga Desa Buo, berpartisipasi aktif agar bisa segera mengatasi kekurangan Air bersih selama puluhan tahun. Warga Desa Buo pun secara aktif membangun tempat penampungan air bersih dan saluran-saluran pipa ke rumah-rumah warga desa. Akhirnya pada tahun 2013 program ini diselesaikan atas dukungan dan

partisipasi aktif masyarakat dengan cara membentuk paguyuban khusus mengelola air bersih.

### **Konsep Kebudayaan**

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program PNPM di Desa Buo terdapat dasar-dasar persamaan pola kebudayaan asal di antara para anggota warga sangat menentukan tingkat penerimaan dan kepatuhan mereka secara keseluruhan terhadap norma dan perilaku tertentu yang diperkenalkan. Latar belakang budaya seseorang akan sangat menentukan cara pandang terhadap suatu perilaku dan norma tertentu.

Pada kegiatannya, budaya menjadi pendorong lembaga untuk mempercepat kebijakan program yang akan dibuat. Selain itu juga budaya menjadi media untuk menangani terjadinya konflik antar pengurus dengan anggota. Sehingga budaya dapat dijadikan aturan dan pedoman masyarakat sebagai bentuk cermin dalam bertindak dan berperilaku seluruh anggota.

Menurut Koentjaraningrat (1990) fungsi dari kebudayaan yaitu: Nilai-nilai budaya ini

berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu sangat umum dan memiliki ruang lingkup yang luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Makna nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari kebudayaan yang bersangkutan.

Kebudayaan juga dapat dijadikan sebagai pengendali sosial dalam masyarakat karena di dalamnya terkandung batasan-batasan atau aturan bagi warganya dalam berkehidupan.

### **Konsep Masyarakat**

Menurut Koentjaraningrat " manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup berkelompok apabila ditemukan suatu tingkah laku yang efektif dalam menanggulangi suatu masalah hidup maka tingkah laku itu tentu diulanginya setiap kali masalah itu timbul. masyarakat adalah keseluruhan kompleks hubungan manusia yang sangat luas sifatnya masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan

terikat oleh rasa identitas tertentu bersama. (Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta :Rineka Cipta ).

### **Konsep Partisipasi**

Partisipasi masyarakat menurut Isbendi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah. Pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Moeljarto (1987) bahwa partisipasi masyarakat memiliki efek sosial antara lain: Menjadikan kepentingan masyarakat sebagai fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan; Menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; Menciptakan suatu siklus umpan berputar pada informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi ini merupakan bagian dari efisiensi dari pem-

bangunan; Jalannya proses pembangunan akan dapat dilaksanakan lebih baik karena masyarakat memiliki rasa pemilikan; Kemampuan untuk memperluas jangkauan pengembangan proyek pembangunan; Kemampuan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemerintah pada seluruh masyarakat dan menopang proses pembangunan yang berlangsung; Menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artikulasi potensi individu maupun pertumbuhan kelompok individu; Merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat dalam pengelolaan perencanaan pembangunan; dan Mencerminkan hak-hak demokratis individu yang terlibat dalam pembangunan mereka sendiri.

### **Konsep Pembangunan**

Parsudi Suparlan (1997) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah badan-badan atau lembaga-lembaga internasional atau lokal yang terwujud dalam bentuk-bentuk kebijaksanaan, program atau proyek yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu

masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera dari pada sebelum adanya pembangunan tersebut.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011)

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat

produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

### **PNPM Mandiri**

PNPM Mandiri adalah salah satu program pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar atau acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. (Royat, 2007)

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai sudah berhasil. Beberapa keberhasilan yang dihasilkan di antaranya adalah tersedianya lapangan

pekerjaan dan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin, efisien dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem dan kelembagaan kerja sama antar desa.

### **Kegiatan PNPM Mandiri di Desa Buo Kecamatan Loloda**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu melalui program PNPM, desa tercermin dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong yang berasal dari masyarakat Desa Buo itu sendiri, sesuai, program PNPM mandiri perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

Sosialisasi dan penyebaran informasi program baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan atau memanfaatkan media atau saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintah.

Partisipasi pemetaan rumah tangga miskin (RTM) yang ada di Desa Buo dan pemetaan sosial masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin/atau sangat miskin, masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi atau situasi sesungguhnya di desa mereka, yang berguna untuk mengakses masa depan desa, untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan air bersih.

Perencanaan partisipatif di tingkat dusun desa dan kecamatan, masyarakat memilih fasilitator desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) satu laki-laki dan satu perempuan untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan KPM ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan

berdasarkan potensi sumber daya alam dan manusia untuk menggagas masa depan desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi atau membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan atau gagasan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah desa.

Seleksi atau prioritas kegiatan di tingkat desa dan kecamatan, masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling dibutuhkan atau mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai diambil

dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah *open menu* untuk semua investasi produktif kecuali yang tercantum dalam daftar larangan. Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka dalam forum musyawarah. Masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator teknis PNPM Mandiri Perdesaan akan mendampingi TPK dalam mendesain sarana atau prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perdesaan) penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana atau prasarana yang



berasal dari warga desa menerima manfaat.

Usulan masyarakat Desa Buo tentang air bersih, disahkan melalui musyawarah yang sudah diprogramkan oleh pemerintah di gedung pertemuan Kecamatan Loloda pada tahun 2012 dan direalisasikan pada tahun 2013 yang lalu, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pelayanan peningkatan pengelolaan air bersih di Desa Buo maka perlu dibangun suatu sistem pengelolaan air bersih yang memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas serta terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Tujuan dibangunnya pengelolaan air bersih oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu adalah wajar jika terlebih dahulu perlu ada tujuan pengelolaan sumber daya air itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di mana sumber daya air harus dikelola dengan memperhatikan fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan dalam sumber daya air itu sendiri.

Dibentuknya program pengelolaan air bersih ini karena adanya usulan dari masyarakat Desa Buo yang saat ini masih sangat membutuhkan air bersih. Pengelolaan air bersih dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih melalui musyawarah warga, yang disebut dengan PPK bertugas mengoordinir para anggotanya dalam rangka melaksanakan program yang ada di Desa Buo, Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, petugas dan masyarakat Desa Buo berhasil membuat dua tempat penampungan air bersih untuk disalurkan ke rumah-rumah warga satu penampungan berada di wilayah timur, dan penampungan yang kedua berada di wilayah selatan, dua penampungan tersebut adalah penyimpanan air bersih yang siap disalurkan ke rumah-rumah warga setelah selesai semua program pelaksanaan pengelolaan air bersih warga Desa Buo bisa menikmati air bersih tanpa harus berjalan kaki lagi ke Tora untuk mendapatkan air bersih .

Dalam realitasnya proyek pembangunan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Buo Kecamatan Loloda yang dilaksanakan dalam

kurung waktu satu bulan, hanya terdapat satu kegiatan saja, yaitu: pembangunan sarana air Bersih, merupakan realisasi dari kesepakatan masyarakat pada Tahun 2013, proyek tersebut saat ini telah dinikmati oleh masyarakat Desa Buo, terutama air bersih merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.

### **Partisipasi masyarakat Desa Buo dalam perencanaan kegiatan PNPM**

Partisipasi masyarakat Desa Buo dalam perencanaan kegiatan PNPM mandiri pedesaan diawali dengan keterlibatan dalam proses pemetaan kemiskinan. Dari hasil wawancara mendalam dengan masyarakat Desa Buo terungkap bahwa karakter kemiskinan yang dominan berpusat kepemilikan aset, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pekerja. Namun demikian, berdasarkan pengamatan penulis masyarakat Desa Buo, yang umumnya memiliki mata pencarian utama sebagai petani sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, bahkan ada warga yang memiliki fasilitas kendaraan yang relatif memadai, lampiran memenuhi kebutuhan ini berarti

bahwa kemiskinan yang dialami oleh warga Desa Buo adalah kemiskinan dalam hal keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya.

Apa yang dikemukakan di atas sejalan dengan pendapat Chamber (1983) yang menyebutkan bahwa kemiskinan berkaitan pula dengan masalah akses terhadap sumber daya air, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan sanitasi, pendidikan dan transportasi. Jika demikian maka pilihan warga masyarakat Desa Buo mengajukan usulan kegiatan berupa sarana air bersih ini sudah tepat.

Tentang keterlibatan masyarakat Desa Buo, dalam hal penyampaian gagasan pembangunan berdasarkan data-data yang diperoleh dan pengamatan penulis, dapat ditegaskan kembali bahwa dalam hal pembangunan, tampak adanya keterlibatan dari masyarakat Desa Buo, keterlibatan dalam hal pembangunan ini bilah ditelaah lebih jauh, masih relatif baik. artinya hanya untuk memenuhi persyaratan program. Dalam definisi Arstein dan Harwati (2006), mengatakan bahwa keterlibatan yang demikian itu disebut

sebagai keterlibatan semua masyarakat tampak terlibat dalam hal pembangunan dan sesungguhnya perencanaan ide awal berasal dari masyarakat itu sendiri.

### **Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM**

Tahap pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan merupakan tahap yang sangat penting karena akan menentukan keberhasilan rangkaian kegiatan. Sebaik apa pun perencanaan yang telah dibuat akan menjadi sia-sia jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu tahap ini dipandang sebagai tahap yang sangat penting dalam kebutuhan masyarakat Desa Buo. Dapat dikatakan pula bahwa keberhasilan suatu program secara keseluruhan lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan yang diraih pada tahap pelaksanaan. Tahapan ini tidak berarti mengecualikan pentingnya tahap perencanaan maupun tahap pelestarian hasil pembangunan air Bersih.

### **Partisipasi masyarakat Desa Buo, dalam pelestarian kegiatan PNPM.**

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada

masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Oleh karena itu mutlak diperlukan adanya upaya pelestarian. Pelestarian adalah tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Ini berarti bahwa partisipasi masyarakat mutlak diperlakukan agar hasil-hasil kegiatan PNPM dapat lestari atau bermanfaat secara berkelanjutan. Jika tidak, maka sanksinya sudah jelas, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat maka desa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.

Tentang adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan adalah kegiatan pemerintah, penulis cenderung berpendapat bahwa hal itu merupakan salah satu dampak dari pola pendekatan pembangunan yang telah lama dilakukan pemerintah pada masa lalu, yakni pendekatan *top down*. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat mutlak dilakukan. Masyarakat harus menempatkan posisinya

sebagai subyek dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Secara umum, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan ini relatif baik. Hal ini ditandai dengan adanya inisiatif dari pengurus dan masyarakat Desa Buo, melalui musyawarah, menetapkan biaya atau tarif yang dibebankan untuk biaya operasional dan perawatan sarana air bersih tersebut. Meskipun ada segelintir warga yang mengeluh, tetapi umumnya warga tunduk dan taat pada keputusan bersama tersebut.

### **Bentuk dan Tipe Partisipasi Masyarakat Desa Buo**

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representasi.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, Partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua (2 jenis), yaitu bentuk partisipasi

yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda. Tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran. Pengambilan keputusan dan partisipasi representasi.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk sumbangan harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif. Baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial yang diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan menghadihi kematian, dan lainnya dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

Bentuk partisipasi berupa tenaga seperti kerja bakti lazim dilakukan karena partisipasi ini lebih dominan dan selalu dilakukan oleh pemerintah desa. Partisipasi ini dilaksanakan dengan himbauan kepala desa untuk berkumpul dan diinformasikan oleh ketua RT dan dilakukan dengan pengerahan masa. Jadi partisipasi seperti ini juga dikenal dengan memobilisasi masyarakat desa untuk diikutsertakan dalam bentuk kerja bakti secara massal

namun tidak setiap hari tetapi waktu-waktu tertentu.

Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi /forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terikat dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Pada dasarnya. Tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata, keberhasilannya tergantung pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi

### **Faktor–Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat Desa Buo Dalam Pelaksanaan Program PNPM**

Faktor kebutuhan masyarakat menjadi alasan utama masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Buo, permasalahan yang kompleks di Desa Buo, menjadi faktor masyarakat membutuhkan pro-

gram yang membawa perubahan. Melalui program air bersih dari PNPM Mandiri Perdesaan, kebutuhan masyarakat akan lingkungan tempat tinggal, ekonomi dan sosial yang lebih baik perlahan terwujud. Hal ini senada dengan pernyataan dari Rekhanah bahwa faktor pendorong masyarakat Desa Buo ikut berpartisipasi dalam program PNPM Mandiri Perdesaan adalah kebutuhan akan air bersih. di mana dari segi ekonomi yang menginginkan naiknya taraf hidup masyarakat melalui bantuan dari pemerintah yaitu program PNPM dalam pemanfaatan air bersih, dari segi sosial masyarakat ingin mempunyai keterampilan dalam menjalankan usaha dan dengan banyaknya kunjungan, masyarakat Desa Buo juga berharap desanya semakin dikenal masyarakat luas.

### **Faktor Sosial Budaya Masyarakat Desa Buo Dalam Pelaksanaan Program PNPM**

*Marimoy* merupakan istilah gotong royong yang sudah banyak orang kenal, yang artinya sebagai bentuk kerja sama yang bersifat sukarela. Tanpa disadari, gotong royong sudah mendarah daging, bahkan menjadi ciri khas

Bangsa Indonesia. Sistem sosial *Marimoy* telah membuktikan bahwa di Desa Buo hidup semangat kesalehan sosial untuk saling membantu dan bergotong royong sebagai sebuah relasi sosial turun temurun.

Di bidang sosial budaya, paguyuban Air Hidup telah memberikan warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat Buo. Keberadaannya berkontribusi mendukung budaya dan adat istiadat di Desa Buo. Bahkan peranannya menjadi sentral ketika ada acara adat. Dan juga masyarakat yang kurang mampu membutuhkan keberadaan air bersih guna memenuhi kebutuhan acara tersebut. Sehingga seluruh anggota dan pengurus saling membantu masyarakat yang membutuhkan, untuk mengalirkan air bersih demi memenuhi kebutuhan acara adat.

Di lain sisi, paguyuban Air Hidup menjadi salah satu wadah pendorong pelestarian nilai-nilai lokal yang ada di Desa Buo. Meskipun nilai lokal tersebut telah menjadi budaya masyarakat, tetapi untuk merekatkan nilai tersebut pada kegiatan sosial memerlukan dorongan agar masyarakat masih tetap menggunakannya sebagai

pedoman dalam kehidupan bersama.

Nilai lokal yang berupa kebersamaan dan gotong royong serta norma di masyarakat masih tetap dijalankan khususnya kegiatan membangun rumah. Kegiatan *Marimoy* atau gotong royong membangun rumah warga menjadi nilai lokal yang masih bertahan, bahkan kegiatannya selalu didukung oleh paguyuban Air Hidup dalam menyediakan air untuk kegiatan pembangunan rumah tersebut. Sehingga warga yang ikut di kegiatan *Marimoy* menjadi semakin antusias karena tidak memikirkan air yang akan digunakan membangun rumah dan juga warga tidak khawatir terhadap kondisi air bersih di rumah masing-masing. Dengan demikian, dukungan Paguyuban Air Hidup berkontribusi besar untuk merekatkan solidaritas antar warga dan juga memicu untuk tetap mempertahankan nilai-nilai lokal sebagai aturan sosial di masyarakat.

Manfaat menggunakan kelembagaan lokal pada pengelolaan air bersih di Desa Buo memberikan ruang yang lebih luas pada upaya keberlanjutan kegiatan yang

dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan untuk mengupayakan agar terjadi keberlanjutan dan kebijakan baru yang dilakukan oleh pengurus berupa kegiatan peternakan kambing dan domba yang dikelola oleh Paguyuban Air Hidup untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Keberlanjutan ini sebagai upaya meningkatkan cakupan bidang kerja selain pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Dipilihnya pengembangan peternakan oleh pengurus melihat dari besarnya potensi sumber daya lokal berupa melimpahnya rumput untuk pakan ternak, ketersediaan air bersih dan budaya masyarakat nilai ternak sebagai simbol status sosial menjadi pendorong dikembangkannya potensi lokal sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan. Selain di bidang peternakan, anggota paguyuban juga melakukan pembibitan kelapa, pala, cengkih, pohon Cempaka untuk dijual ke sekitar wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai komoditas unggulan yang difasilitasi paguyuban Air Hidup sebagai media promosi penjualan di masyarakat. Kebijakan pengurus dalam upaya

meningkatkan keberlanjutan melalui peningkatan perekonomian anggota pada kegiatan peternakan dan budi daya pohon yang bernilai ekonomis menjadi rencana kebijakan di kepengurusan periode berikutnya.

### **Kesimpulan**

Secara umum partisipasi masyarakat Desa Buo, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dalam keseluruhan proses pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Buo, Kecamatan Loloda namun perlu adanya peningkatan dengan cara memberikan lebih banyak pengetahuan serta wa-

wasan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah program maupun pembangunan masyarakat Desa Buo, hanya antusias untuk terlibat pada saat proses pengenalan dan perencanaan. Sementara keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bahkan untuk pemeliharaan hasil pembangunan dapat dikatakan perlu adanya peningkatan. PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebuah program yang fokus terhadap pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu kesadaran masyarakat untuk ikut serta sangat penting demi keberhasilan tujuan program.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwas, Oos M, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Ardianto, Elvinaro dan Harun, Rochajat. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aziz Muslim. 2012. *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudera Baru
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2008, Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2012, Laporan Akhir Tahun PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2002-2011*
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. 2009. *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*. Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat (edisi revisi)*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma
- Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Cetakan ke-2) Jakarta: Aksara Baru
- \_\_\_\_\_. 1990. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- \_\_\_\_\_. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Machendrawati, Nanih. Agus Ahmad Syafe'i. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya

- Moeljarto Tjokrowinoto. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Nasution, S . 1988. *Metode Penelitian Naturalistik- Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Suharto Edi. 1997. *Pembangunan Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial: Spectrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS
- Suparlan, Parsudi. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta Yayasan Obor
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang : UM –Press
- Talisiduhu, Ndraha. 1982. *Peranan Administrasi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta :UGM
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Clogapps Diponegoro University
- \_\_\_\_\_. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Atama.
- Siti Irene Astuti. 2009. *Desentralisasi Dan Partisipasi Dan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY
- Royat, Sujana. 2007. *Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*, Lembaga Kesra-RI, Jakarta
- Suparlan, Parsudi. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan isu Pembangunan*. Malang :UM-Press
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana